

**MENGGALI POTENSI NAGARI UNTUK PENGUATAN
BUMNag 12 SUKU DI NAGARI SALIMPAUANG**

***EXPLORE NAGARI'S POTENTIAL FOR STRENGTHENING
BUMNag 12 SUKU IN NAGARI SALIMPAUANG***

Yuliarti¹⁾, Hidayatul Fajri²⁾, Artha Dini Akmal³⁾

^{1, 2, 3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

¹Email: yuliarti@fis.unp.ac.id

Abstrak Berdiri semenjak 2018 ternyata BUMNag 12 Suku masih masuk dalam kategori rintisan, hal ini disebabkan oleh masih buruknya pengelolaan BUMNag oleh pengurus BUMNag periode 2018-2020. Selama periode tersebut sudah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali yang mengakibatkan BUMNag tidak bisa menjalankan usahanya sesuai dengan target pemerintahan nagari. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah selama periode tersebut BUMNag menjalankan usaha dengan tidak mempertimbangkan peluang dan potensi Nagari Salimpauang. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu terkait strategi pengembangan BUMNag. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Nagari Salimpauang Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dalam bentuk penyampaian materi terkait tata kelola BUMNag, selain itu juga menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) diskusi dan pendampingan dalam menggali apa yang menjadi potensi nagari hingga dapat dijadikan unit usaha BUMNag. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pengurus BUMNag dan aparatur nagari terkait dalam tata kelola BUMNag, adanya kemampuan pemetaan potensi nagari, dan peningkatan kinerja dan produktivitas BUMNag melalui unit usaha yang sesuai dengan potensi nagari.

Kata Kunci : BUMNag, Tata Kelola, Potensi Nagari

Abstract *The existence of BUMNag will create an independent Nagari when the BUMNag can grow and contribute to the income of the Nagari and the welfare of the community. Good governance capabilities, as well as the ability to explore and map local potential (original Nagari), are basic skills that must be possessed in developing BUMNag. Established in 2018, BUMNag 12 Tribes in Nagari Salimpauang are included in the pilot classification, changes in the management structure that repeatedly make their position seem to be running in place. The absence of a business unit that is by the potential of the Nagari is a form of the lack of ability of BUMNag management in determining the right business unit. The photocopy and ATK business is business units managed by BUMNag 12 Tribes and is economically a loss. This business also competes with the businesses of the surrounding community, this is certainly not by the function and role of BUMNag. Therefore, this community service activity aims to contribute thoughts and knowledge related to the BUMNag development strategy. The service activity was carried out in Nagari Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar. The method*

used in this service activity is socialization in the form of delivering material related to BUMNag governance, in addition to using the Participatory Rural Appraisal (PRA) method of discussion and assistance in exploring what is the potential of the Nagari so that it can be used as a BUMNag business unit. The results to be achieved from this activity are an increase in the knowledge of BUMNag management and related Nagari apparatus in BUMNag governance, the ability to map the potential of Nagari, and increase the performance and productivity of BUMNag through business units that are by the potential of the Nagari.

Keywords: *BUMNag, Governance, Nagari Potential*

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pertumbuhan adalah dua hal yang secara dasar tidak dapat dipisahkan, karena pembangunan adalah suatu proses yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat dari pembangunan (Digdowiseiso, 2019). Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika terjadi pertumbuhan atau peningkatan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai negara yang memiliki puluhan juta penduduk yang perlu disejaterahkan dan tersebar di berbagai wilayah administratif di Indonesia, rasanya terlalu berat jika beban pembangunan nasional hanya dipikul kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembangunan di setiap desa hingga terciptanya desa yang mandiri atau kemandirian desa sebagai pondasi pembangunan nasional.

Di Provinsi Sumatera Barat desa dikenal dengan nagari (setara secara administratif). Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mandiri atau nagari mandiri berarti mempunyai kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Menurut (Kurniawan, 2015), dalam membangun kemandirian desa, ada beberapa strategi yang umumnya dilaksanakan yaitu: *pertama*, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa dengan kritis dan dinamis; *kedua*, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; *ketiga*, membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan

partisipatif; dan *keempat*, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau dalam hal ini Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nagari, hal ini dimuat dalam Permendagri No 39 Tahun 2010.

BUMNag adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan membangun keerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari (Maryunani, 2008). Menjadi kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, serta dapat menampung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu pada potensi lokal (asli nagari) merupakan cara kerja BUMNag agar tetap tumbuh dan berkembang hingga memberikan kontribusi bagi pendatan desa atau nagari (Zulkarnaen, 2016).

Berdasarkan data dari 928 nagari di Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 858 diantaranya sudah terbentuk BUMNag. Hingga awal 2021, BUMNag yang masuk klasifikasi maju 41, berkembang 327, tumbuh 340 dan klasifikasi rintisan 141 buah (Pondra, 2021)

Nagari Salimpauang di Kabupaten Tanah Datar yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini, menjadi salah satu dari 928 nagari yang sudah mendirikan BUMNag Bediri sejak tahun 2018 dengan nama BUMNag 12 Suku. Sebagian besar wilayah di Nagari Salimpauang merupakan areal sawah, perkampungan dan kebun. Berdasarkan data yang ada di website resmi Nagari Salimpauang, terdapat 16,01% masyarakat yang bekerja sebagai petani/pekebun (mayoritas), PNS 3,79%, masyarakat yang berdagang sebanyak 1,78%, pekerja produktif lainnya dibawah 1%, selebihnya masuk pada kategori pekerja non produktif (Salimpauang, 2020).

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah ini adalah sebuah potensi lokal yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMNag dengan memberdayakan masyarakat nagari sebagai sumber daya manusia. Namun keberadaan BUMNag 12 Suku seperti berjalan ditempat, hal ini dikarenakan berulang kali mengalami

perubahan struktur kepengurusan dan dapat diartikan bahwa BUMNag 12 Suku masuk kedalam klasifikasi rintisan.

Berikut ini permasalahan dasar yang di hadapi mitra dalam mengembangkan BUMNag 12 Suku :

- 1) Kurangnya pengetahuan aparatur nagari dan pengurus dalam mengelola BUMNag
- 2) Belum adanya pemetaan terkait potensi nagari yang dapat dikelola oleh BUMNag
- 3) Belum adanya strategi dalam pengembangan BUMNag.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh BUMNag 12 Suku, maka tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah :

- a) Meningkatnya pengetahuan aparatur nagari dan pengurus dalam mengelola BUMNag yang sesuai dengan Undang-undang dan Pedoman Tata Kelola.
- b) Adanya pemetaan potensi nagari yang di nagari Salimpauang
- c) Mengembangkan kinerja dan produktivitas BUMNag melalui unit usaha berdasarkan potensi nagari.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut

- 1) Sosialisasi. Dilakukan dengan cara memberikan penyampaian materi atau ceramah terkait tata kelola BUMNag dan menggali potensi lokal (nagari).
- 2) *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Pendekatan ini menekankan pada peran dan keterlibatan langsung peserta pelatihan dan dilakukan dalam bentuk permainan untuk mengatasi kejenuhan. Peserta diminta melakukan analisis terkait kondisi dan potensi nagari yang mereka ketahui.
- 3) *Brainstorming* dengan peserta pelatihan mengumpulkan gagasan dalam menentukan strategi bisnis BUMNag 12 Suku kedepannya.
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengurus BUMNag dalam pengelolaan unit usaha yang sudah direncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh TIM pengabdian di nagari Salimpauang dapat dilihat dari rentetan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dimulai dengan persiapan awal yaitu mencari dan menentukan lokasi mitra, survey awal, meminta kerja sama, dan menyusun proposal.



Gambar 1. Survey awal

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 september yang bertempat di kantor wali nagari Salimpauang. Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh seluruh pengurus BUMNag, perangkat nagari yang terkait dan beberapa perwakilan dari masyarakat.

Kegiatan di hari pertama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi terkait "Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Yang Sesuai Dengan UU dan Pedoman Tata Kelola". Sosialisasi diberikan dalam bentuk presentasi atau penyampaian materi.

Artha Dini Akmal yang selanjutnya disebut sebagai narasumber, dalam pemaparan materinya tentang pengelolaan BUMNag menjelaskan bahwa organisasi pengelolaan BUMNag berbeda atau terpisah dengan organisasi pemerintah nagari, maknanya adalah pelaksanaan operasional dilarang merangkap jabatan pada pelaksana pemerintah desa ataupun lembaga lainnya, hal ini dimaksud agar pelaksana operasional lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUMNag. Peranan pemerintah nagari disini adalah memberikan dukungan untuk pengembangan BUMNag. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Desa ditegaskan bahwa organisasi pengelolaan BUMNag terpisah dengan organisasi pemerintahan nagari.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Artha Dini Akmal

Narasumber menjelaskan bahwa dalam pedoman tata kelola ada rumusan dalam organisasi pengelolaan yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- 1) Bahwa BUM Desa adalah nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa;
- 2) BUM Desa bukanlah sebuah *holding company* (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa;
- 3) Organisasi pengelola BUM Desa adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUM Desa dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya; dan
- 4) Organisasi pengelola BUM Desa secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas.

Pedoman Tata Kelola BUMDes di atas juga berlaku untuk organisasi pengelolaan BUMNag. Kemudian narasumber menegaskan bahwa dalam tata kelola, BUMNag juga harus tunduk pada tata kelola keuangan nagari yang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa atau Nagari sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ini menjadi hal wajib dipahami oleh pengurus BUMNag. Pemodalan BUMNag dapat bersumber dari dana nagari (dana desa), dan atau modal yang dibangun dari inisiatif masyarakat.

Selain pemaparan materi, narasumber juga memutar video tentang sejarah BUMDes Niagara Kabupaten Bandung. Pemutaran video ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi para pengurus dalam mengelola dan mengembangkan BUMNag 12 Suku.

Masih pada hari yang sama 27 September 2021, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan sosialisasi terkait pentingnya menggali potensi untuk kemandirian nagari. Hidayatul Fajri sebagai narasumber kedua, menjelaskan bahwa potensi nagari berupa SDA dan SDM yang dimiliki oleh nagari yang memiliki nilai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan nagari .

Potensi nagari yang ada tidak akan memberikan manfaat jika tidak ada pengembangan potensi. Narasumber menjelaskan bahwa disinilah peranan BUMNag dibutuhkan, pengurus BUMNag harus mampu menggali potensi nagari, memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nagari. Pengurus BUMNag tidak boleh salah dalam memilih unit usaha yang akan dikembangkan.

Kemudian narasumber memandu peserta pelatihan untuk mendiskusikan dan menggali lebih dalam apa yang bisa menjadi potensi nagari. Diskusi ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dalam kegiatan ini peserta diajak berdiskusi dengan cara yang lebih menyenangkan, dimana peserta diminta menuliskan pemikiran mereka terkait pertanyaan pemateri diatas kertas kecil (dalam bentuk *sticky notes*), yang kemudian ditempelkan langsung media yang lebih besar seperti gambar dibawah ini.



Gambar 3. Hidayatul Fajri memberikan materi dan memandu PRA

Hasil dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya beberapa hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam pengembangan BUMNag 12 Suku :

Kekuatan (*Strength*)

- a. Sumber daya alam (SDA) berupa sawah, perkebunan dan lahan untuk perternakan
- b. Sumber daya manusia (SDM)
- c. Tersedianya modal usaha
- d. Dukungan penuh pemerintah nagari
- e. Pengurus BUMNag terdiri dari SDM yang berpengalaman dalam pekerjaannya (petani dan peternak)
- f. Pengurus BUMNag yang baru punya semangat komitmen yang kuat

Kelemahan (*Weakness*)

- a. Kurangnya SDM dalam kepengurusan BUMNag, karena hanya terdiri dari pengurus inti tanpa anggota
- b. Struktur kepengurusan yang berubah-ubah dalam waktu singkat
- c. Sarana prasarana yang ada kurang dimanfaatkan

Peluang (*Opportunity*)

- a. Sudah pernah ada tawaran kerja sama dari kebun binatang Bukit Tinggi
- b. Ada unit usaha yang belum ada atau belum dikelola dengan baik
- c. Perkembangan teknologisemakin maju

Ancaman (*Treath*)

- a. Belum bisa menggunakan teknologi secara maksimal
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMNag

Kegiatan pengabdian berlanjut pada tanggal 28 September 2021 dengan *brainstoming* di rumah salah satu pengurus BUMNag, sekaligus tinjauan potensi. Perubahan lokasi merupakan permintaan dari pengurus langsung.



Gambar 4. Brainstoming

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa strategi dalam pengembangan BUMNag 12 suku, yaitu :

- 1) Perlunya penambahan anggota dalam kepengurusan BUMNag 12 Suku, dan perekrutan anggota harus berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.
- 2) Perlunya dukungan pemerintah nagari dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan yang bersifat *continue*, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengurus BUMNag
- 3) Mengundang masyarakat dalam berbagai kegiatan BUMNag dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMNag
- 4) BUMNag 12 Suku dapat mengembangkan unit usaha: pengolahan dan penjualan pupuk kompos serta pupuk cair organik (PCO), pengolahan dan penjualan pakan ternak, pengolahan saus tomat, pemeliharaan sapi korban, pengelolaan pasar dan unit usaha jasa simpan pinjam.
- 5) Dalam menjalankan unit usaha, BUMNag dapat merekrut anggota baru atau perbantuan tenaga kerja harian
- 6) Memanfaatkan jaringan pemasaran baik secara *offline* maupun *online* dalam memperkenalkan dan memasarkan produk dari unit usaha BUMNag 12 Suku.

Pada tanggal 22 november 2021, TIM pengabdian kembali ke nagari Salimpauang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Tahapan ini dibutuhkan untuk memantau progresifitas pengurus BUMNag dalam menerapkan strategi pengembangan. Dari keenam unit usaha yang direncanakan, saat ini BUMNag 12 Suku lebih fokus dalam mengembangkan unit usaha pengolahan dan penjualan pupuk kompos. Alasan yang mendasarinya adalah banyaknya permintaan pupuk oleh masyarakat di sekitar nagari Salimpauang, salah satu dari pengurus memiliki pengalaman dalam pengolahan pupuk kompos dari kotoran ternak (sapi), adanya alat industri pengolahan kayu manis yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah pupuk dengan tekstur yang lebih halus, serta adanya tawaran kerja sama dari kebun binatang Bukit Tinggi sebagai *supplier* kotoran (gajah).

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga dapat diketahui, unit usaha

ini mampu memproduksi pupuk kompos ± 100 ton dan pupuk organik cair (POC) sebanyak 500 liter. Adapun yang menjadi konsumen saat ini adalah masyarakat di nagari salimpauang sendiri dan disekitar kambupaten Tanah Datar. Untuk perbantuan dipekerjakan tenaga harian yang dengan upah Rp. 100.000,- per hari. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah kurangnya biaya sehingga produksi tidak dapat ditingkatkan.



Gambar 5. Proses Produksi Pupuk Kompos dan Pupuk Cair Organik, beserta Produk yang sudah Dikemas

Selain itu pemantauan juga dilakukan melalui platform chat *Whatshaap* atau via telfon. Hal ini sangat diperlukan karena keterbatasan tim untuk melakukan kunjungan langsung dan sebagai wujud pendampingan dari TIM untu mitra pengabdian.

KESIMPULAN

Partisipasi pengurus BUMNag 12 Suku dan aparaturnagari yang terkait dalam kegiatan pengabdian ini sangat lah besar, hal ini tercemin dari kehadiran dan antusias peserta dalam mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Bahkan diluar rencana, TIM pengabdi diajak oleh pengurus BUMNag untuk melihat langsung potensi-potensi yang dimiliki nagari Salimpauang, seperti gudang, alat industri produksi kayu manis dan alat pengolahan saus tomat (yang rata-rata terbengkalai).

Adanya peningkatan kinerja BUMNag 12 Suku, saat ini pengurus BUMNag sedang fokus dalam menjalankan unit usaha atau bisnis pengolahan dan penjualan pupuk kompos serta pupuk cair organik (PCO), untuk produksi pertama \pm 100 ton pupuk kompos dan 500 liter POC.

Kegiatan pengabdian ini memiliki potensi besar untuk dilanjutkan sesuai dengan keinginan mitra, hal ini juga sesuai dengan pemikiran TIM pengabdian bahwa masih diperlukan peningkatan pengetahuan pengurus BUMNag dalam beberapa aspek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah membiayai pengabdian ini dengan nomor kontrak pengabdian: 1257/UN35.13/PM/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Digdowniseiso, K. (2019). Teori Pembangunan. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pondra, A. (2021, Maret 30). Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat. Retrieved from sumbarprov.go.id: <https://sumbarprov.go.id/home/news/20239-kadis-pmd-ayo-majukan-bumnag-untuk-perekonomian-di-nagari>
- Salimpauang, P. N. (2020). Nagari Salimpauang. Retrieved from Nagari Salimpauang: <https://salimpaung.desa.id/index.php/first/statistik/1>
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya, 1-4.